



KTT KE-31 ASEAN DAN UPAYA MENJAGA STABILITAS KAWASAN

Simela Victor Muhamad*)

Abstrak

Pemberitaan seputar ASEAN kembali muncul, setelah Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara tersebut menyelenggarakan KTT yang ke-31, di Manila, Filipina. Isu keamanan dan kaitannya dengan upaya menjaga stabilitas kawasan menjadi agenda utama KTT. Berbagai persoalan keamanan di kawasan yang belum berhasil diatasi atau berpotensi memunculkan masalah bagi stabilitas kawasan menjadi perhatian, karena jika dibiarkan berlanjut dan tidak ada upaya untuk mengatasinya maka akan berdampak pada stabilitas kawasan dan menghambat upaya ASEAN dalam memajukan kawasan. KTT ke-31 ASEAN menjadi momentum bagi ASEAN untuk memperkuat kerja sama di antara negara-negara anggota dalam menangani berbagai persoalan yang bisa mengancam stabilitas kawasan. ASEAN akan semakin diperhitungkan masyarakat internasional jika berhasil menjaga stabilitas kawasan, dan hal tersebut menjadi modal berharga bagi ASEAN untuk berkontribusi lebih jauh secara politik ketika dilibatkan dalam penanganan konflik-konflik regional dan internasional.

Pendahuluan

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) baru saja menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang ke-31, tepatnya pada tanggal 13-14 November 2017, di Manila, Filipina. Stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya menjadi isu utama dalam KTT, yang dipandang oleh ASEAN sebagai faktor penting untuk menjaga perdagangan, pertumbuhan ekonomi, serta keberlanjutan program-program ASEAN

secara internal ataupun eksternal dengan negara mitra ASEAN. Presiden Filipina Rodrigo Duterte, selaku Ketua ASEAN, dalam pidato pembukaan KTT juga menekankan pentingnya bagi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara ini untuk menaruh perhatian besar pada isu keamanan regional dan internasional, karena keamanan di tingkat kawasan dan global belum sepenuhnya terbebas dari ancaman. Duterte menyebutkan bahwa terorisme dan radikalisme, serta bajak

*) Peneliti Madya Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: simela.muhamad@dpr.go.id



laut dan perompakan bersenjata di perairan merupakan ancaman nyata bagi stabilitas dan keamanan kawasan, dan oleh karena itu, ASEAN harus mencermati persoalan ini, selain berbagai persoalan keamanan lainnya yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Tulisan ini mengkaji secara singkat, mengapa isu keamanan dan upaya menjaga stabilitas kawasan menjadi pembahasan utama dalam KTT ke-31 ASEAN?

Persoalan Keamanan Kawasan

Dalam pertemuan-pertemuan di antara para pejabat senior dan menteri luar negeri ASEAN, dalam kerangka persiapan pelaksanaan KTT ke-31 ASEAN, terungkap pandangan bahwa ASEAN perlu untuk terus memperkuat upayanya dalam menjaga stabilitas kawasan di tengah tantangan dan persoalan keamanan di kawasan yang belum sepenuhnya kondusif. Dalam isu Laut China Selatan, misalnya, meskipun arah pembicaraan dalam KTT lebih pada upaya untuk mempercepat proses penyusunan tata perilaku (*Code of Conduct/CoC*), para perwakilan negara-negara ASEAN tetap mengangkat isu Laut China Selatan, bahkan sempat muncul pemikiran bahwa ASEAN perlu menyikapi isu ini secara khusus. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya perubahan konstelasi kekuatan di Asia Pasifik yang tidak dapat ditolak oleh ASEAN, yakni meningkatnya dominasi China (sebagai salah satu pengklaim Laut China Selatan) yang perlu disikapi secara hati-hati untuk menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral. Ini artinya, dalam konteks kepentingan ASEAN dan untuk menjaga stabilitas kawasan, kebangkitan China sebagai kekuatan baru harus diimbangi dengan ketaatan pada tata kelola kawasan yang ada dan hukum internasional.

Persoalan keamanan lainnya yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan adalah ketegangan yang masih terus terjadi di Semenanjung Korea. ASEAN patut khawatir mengingat situasi yang tidak kondusif di Semenanjung Korea, terlebih jika terjadi perang terbuka, tidak saja berdampak pada stabilitas keamanan di sekitar kawasan konflik, tetapi juga dapat berimbas pada kawasan yang lebih luas di mana terdapat kepentingan negara-negara ASEAN di sana, di antaranya jalur perdagangan negara-

negara ASEAN ke sejumlah negara Asia Timur (seperti ke China, Jepang, dan Korea Selatan) yang akan terganggu. Kekhawatiran ASEAN terhadap situasi yang terjadi di Semenanjung Korea tersebut diungkapkan dalam pertemuan *ASEAN Plus Three* yang dihadiri PM China Li Keqiang, yang dianggap dekat dengan Korea Utara sebagai salah satu pihak yang berkonflik di Semenanjung Korea. PM Singapura Lee Hsien Loong, yang akan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2018, mengemukakan dalam kesempatan itu, bahwa sebagai bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas kawasan, konflik yang terjadi di Semenanjung Korea juga harus menjadi perhatian ASEAN dan segera diupayakan solusi damai.

Aksi terorisme dan gerakan-gerakan kelompok radikal yang berpotensi menimbulkan masalah keamanan, sudah tentu juga tidak boleh diabaikan oleh ASEAN, terlebih salah satu negara ASEAN, yakni Filipina, baru saja mengalami situasi yang tidak menguntungkan itu di Kota Marawi, Filipina Selatan. Dunia menyaksikan, akibat dari aksi kelompok militan Islam di Kota Marawi, yang mengklaim sebagai bagian dari kelompok ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) untuk kawasan Asia Tenggara, yang bertempur dengan militer Filipina, sebagian besar kota tersebut hancur dan kehidupan sosial masyarakatnya menderita. Kasus Marawi di Filipina Selatan, yang pernah dikuasai kelompok Maute dengan gerakan radikalismenya, memberi pelajaran penting agar keamanan dijaga dan dipertahankan, sekaligus mengingatkan ASEAN untuk tidak lengah terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan kawasan. Wilayah perairan di sekitar negara-negara ASEAN, seperti Laut Sulu yang berbatasan dengan wilayah Malaysia, Indonesia, dan Filipina, sangat potensial dijadikan pintu masuk bagi aktivitas terorisme, begitu juga dengan wilayah perairan di sekitar Selat Malaka. Aksi-aksi terorisme yang tidak mengenal batasan wilayah, sebagaimana dikemukakan Presiden Duterte dalam pidato penutupan KTT, bukan tidak mungkin akan mengancam stabilitas kawasan.

Kejahatan transnasional, dengan berbagai aktivitasnya yang bersifat lintas negara, sudah tentu juga perlu menjadi perhatian ASEAN. Dalam sesi dialog antara ASEAN dengan mitra wicara,

khususnya dengan Australia dan AS, terungkap pandangan yang menyebutkan bahwa kejahatan transnasional juga berpotensi memunculkan persoalan dan bisa mengganggu stabilitas kawasan. Aksi pembajakan kapal di laut yang masih terjadi hingga kini di sejumlah perairan dunia, misalnya, menjadi salah satu ancaman yang tidak dapat dikesampingkan oleh negara-negara ASEAN yang wilayah perairannya begitu luas dan terbuka. Biro Maritim Internasional (*International Maritime Bureau/IMB*) melaporkan ada 87 aksi bajak laut selama Januari-Juni 2017; aksi itu terbesar terjadi di perairan Indonesia. Di perairan Filipina, meski terjadi penurunan, aksi bajak laut masih dijumpai. ASEAN, setidaknya melalui kerja sama bilateral atau trilateral di antara anggotanya (seperti antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia) harus terus bekerja sama dalam menjaga keamanan laut di perairan perbatasan mereka. KTT pada akhirnya merespons positif upaya penguatan kerja sama tersebut.

Kejahatan transnasional yang berkaitan dengan kegiatan penyelundupan dan perdagangan obat-obatan terlarang (narkoba), juga mendapat perhatian serius ASEAN. Para peserta KTT umumnya sepakat bahwa kejahatan transnasional yang berkaitan dengan aktivitas penyelundupan dan perdagangan narkoba bisa merusak ketahanan nasional dan regional, bahkan mengancam stabilitas, karena yang dijadikan target adalah sumber daya manusia, khususnya generasi muda yang kedepannya diharapkan menjadi pemimpin bangsa di kawasan. Sebagian peserta KTT juga khawatir, kejahatan transnasional yang berkaitan dengan perdagangan gelap narkoba ini akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal untuk mencari dana bagi kegiatan-kegiatan terorisme di kawasan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas kawasan, KTT pada akhirnya juga menyuarakan pentingnya penguatan pemberantasan narkoba di ASEAN.

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, meski hal ini lebih pada isu kemanusiaan, juga menjadi perhatian KTT, dan sebagian peserta (seperti Indonesia dan Malaysia) mencoba untuk melihatnya dari sisi keamanan kawasan. Tidak dapat dibantah

bahwa persoalan pengungsi etnik Rohingya yang mengalir secara besar-besaran ke sejumlah negara di kawasan, sebagai akibat dari krisis yang terjadi di Rakhine, telah memunculkan persoalan bagi negara-negara yang bersangkutan, dan tidak tertutup kemungkinan akan memunculkan persoalan keamanan di kawasan jika tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk mengatasinya. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine dan potensi dampaknya terhadap stabilitas kawasan, tampaknya dipahami oleh peserta KTT, sehingga KTT pun kemudian menyuarakan sikap terkait krisis yang terjadi di salah satu negara bagian di Myanmar tersebut (meskipun istilah “Rohingya” tidak dimunculkan di situ), yakni tentang pentingnya pemulihan situasi dengan cara-cara damai di wilayah itu. Terlepas dari adanya penyikapan KTT terhadap situasi di Rakhine seperti itu, kritik tetap patut diberikan kepada ASEAN karena tidak ada ketegasan sikap dalam melihat krisis kemanusiaan dan situasi di Rakhine, terutama yang berkaitan dengan upaya penyelamatan dan pemberian perlindungan terhadap etnik Rohingya.

Pentingnya Stabilitas Kawasan

KTT ke-31 ASEAN beserta agendanya, khususnya yang berkaitan dengan penyikapan ASEAN terhadap sejumlah persoalan keamanan di kawasan (sebagaimana terlihat di atas) adalah relevan dengan upaya ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan. Karena bagaimanapun, ketika sebuah organisasi di suatu kawasan ingin memajukan kawasannya, baik secara politik, ekonomi, dan sosial, maka organisasi regional tersebut terlebih dahulu harus dapat mengidentifikasi berbagai persoalan di kawasan yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. ASEAN, yang salah satu tujuan pendiriannya adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat negara-negara Asia Tenggara yang menjadi anggotanya, tentu tidak berkeinginan dalam perjalanan organisasinya mengalami hambatan dalam mencapai tujuan tersebut.

Oleh karena itu, stabilitas kawasan menjadi penting bagi ASEAN. Terjaganya stabilitas kawasan menjadi dasar yang kuat bagi ASEAN untuk memajukan kesejahteraan masyarakat kawasan dan juga untuk menjadikan ASEAN sebagai

pusat perekonomian dunia. Berdasarkan data *World Economic Forum*, saat ini ASEAN merupakan kekuatan ekonomi terbesar keenam di dunia. Pada tahun 2020 ASEAN akan menjadi kekuatan ekonomi kelima terbesar di dunia, dan pada 2030, diperkirakan akan tumbuh sebagai pasar keempat terbesar di dunia setelah Uni Eropa, AS, dan China. Kembali kepada KTT ke-31 ASEAN, tidak dapat dielakkan bahwa pembahasan isu keamanan di KTT, tidak dapat dilepaskan dari upaya ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan dan momentum keberhasilan di bidang ekonomi, selain tentunya juga untuk menjaga kelangsungan program pembangunan di masing-masing negara ASEAN.

ASEAN yang kini hadir sebagai salah satu kekuatan ekonomi di dunia dan kawasan, akan semakin diperhitungkan masyarakat internasional ketika berhasil menjaga stabilitas kawasan, dan hal tersebut menjadi modal berharga bagi ASEAN untuk berkontribusi lebih jauh secara politik ketika dilibatkan dalam penanganan konflik-konflik regional dan internasional. Satu contoh nyata, kini sedang berlangsung dan sudah disinggung juga di atas, adalah proses penyusunan CoC di Laut China Selatan, yang melibatkan ASEAN dan China. Dalam proses itu, ada kepercayaan dari China (terlepas dari kepentingan yang melatarbelakanginya) kepada ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan melalui penyusunan CoC di Laut China Selatan yang masih dipersengketakan oleh China dan beberapa negara ASEAN. Kontribusi ASEAN semacam itu diharapkan juga terlihat dalam penanganan konflik di Semenanjung Korea melalui modalitas yang sudah dimiliki ASEAN, yaitu *ASEAN Regional Forum* (ARF), yang keanggotaannya, di antaranya, adalah para pihak yang berkaitan langsung dengan konflik tersebut.

Penutup

Pembahasan persoalan keamanan dalam KTT ke-31 ASEAN sangat berkaitan dengan kepentingan ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan. ASEAN tidak menghendaki berbagai persoalan yang berpotensi memunculkan masalah bagi keamanan kawasan dibiarkan terjadi, karena hal tersebut dapat mengganggu stabilitas, yang pada gilirannya akan menghambat

upaya ASEAN dalam memajukan kawasan, bahkan bisa merusak capaian-capaian pembangunan ASEAN, yang kini telah hadir sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. KTT ke-31 ASEAN menjadi momentum bagi ASEAN untuk memperkuat kerja sama di antara negara-negara anggotanya dalam menangani berbagai persoalan yang bisa mengancam stabilitas kawasan. Kita berharap kesungguhan ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan tidak saja terucap dalam KTT, tetapi juga diwujudkan dalam langkah-langkah nyata ASEAN selanjutnya serta melalui kebijakan-kebijakan negara anggotanya.

Referensi

- “ASEAN-China Bahas COC”, *Kompas*, 14 November 2017, hlm. 10.
- “ASEAN Raih Jaminan China dalam Isu LCS”, *Kompas*, 15 November 2017, hlm. 1.
- “China Harapkan Stabilitas di Kawasan”, *Kompas*, 15 November 2017, hlm. 8.
- “Duterte Says China Agrees to Work on SCS Code of Conduct”, *The Jakarta Post*, 15 November 2017, hlm. 12.
- “Indonesia Dorong ASEAN Jadi Progresif”, *Kompas*, 13 November 2017, hlm. 1.
- “Leaders Talk terrorism”, *The Jakarta Post*, 15 November 2017, hlm. 1.
- “Tak Ada Rohingya di KTT ASEAN”, *Republika*, 14 November 2017, hlm. 1.
- “Terorisme dan LCS Dibahas”, *Kompas*, 11 November 2017, hlm. 10.
- “World Economic Forum on ASEAN”, <https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-on-asean-2017#>, diakses 12 November 2017.